

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Pendidikan Kewarganegaraan

1. Pengertian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Pembelajaran juga dikatakan sebagai proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar. Hakikat belajar adalah “perubahan”, maka hakikat pembelajaran adalah “pengaturan”. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. (Aannisa, 2026)

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu instrumen penting dalam membentuk warga negara yang memiliki karakter, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta konstitusi negara. Melalui pendidikan kewarganegaraan, generasi penerus dibekali pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga mampu berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Nurdiansyah, 2021)

Berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang bertujuan membentuk peserta didik menjadi warga negara yang memahami hak dan kewajibannya serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran ini, peserta didik diharapkan tumbuh menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi).

Pendidikan Kewarganegaraan juga bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik agar mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menyikapi berbagai persoalan kewarganegaraan. Selain itu, peserta didik diharapkan mampu berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta memiliki sikap antikorupsi. Pembelajaran ini juga diarahkan untuk membentuk pribadi yang demokratis dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia sehingga mampu hidup berdampingan dengan masyarakat dari berbagai negara. Di samping itu, peserta didik diharapkan mampu menjalin interaksi dengan masyarakat global, baik secara langsung maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara bijaksana. (Fauzi & Srikantono, 2019).

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan diwajibkan mencakup mata pelajaran Bahasa, Agama, dan Kewarganegaraan. Ketentuan ini menegaskan betapa krusialnya peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membina dan membentuk karakter generasi muda. (Nurdiansyah, 2021).

Menurut Soemantri (2001:154), Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu usaha yang dirancang untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan serta kemampuan dasar mengenai hubungan antara warga negara dan negara, termasuk pemahaman tentang pendidikan pendahuluan bela negara sebagai implementasi amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan pendidikan demokrasi yang bertujuan membentuk warga negara yang mampu berpikir kritis dan bertindak demokratis. Melalui proses pendidikan tersebut, peserta didik ditanamkan kesadaran bahwa demokrasi merupakan sistem kehidupan bermasyarakat yang memberikan jaminan terhadap penghormatan hak-hak warga negara. (Magdalena et al., 2020).

2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada dasarnya diarahkan untuk membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. pembelajaran PKn bertujuan mengembangkan kompetensi peserta didik agar mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menyikapi berbagai persoalan kewarganegaraan. Selain itu, peserta didik diharapkan mampu berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial, memiliki karakter yang demokratis, serta mampu berinteraksi dengan masyarakat global melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut Nurdiansyah, (2021) Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menanamkan serta mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan akhlak mulia pada setiap warga negara. fungsi utamanya adalah sebagai sarana mencetak warga negara yang cerdas, terampil, dan setia kepada NKRI melalui pola pikir serta tindakan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. pendidikan ini juga berupaya membentuk sikap yang sejalan dengan nilai dan norma yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menumbuhkan komitmen terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika, serta memperkuat rasa persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. fungsi utamanya adalah sebagai sarana mencetak warga negara yang cerdas, terampil, dan setia kepada NKRI melalui pola pikir serta tindakan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dapat dipandang dari dua aspek, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, PKn berperan mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, terampil, mandiri, serta memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun secara khusus, PKn bertujuan mengembangkan moral dan karakter peserta didik agar tercermin dalam perilaku sehari-hari, seperti menjunjung

tinggi nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, demokrasi, persatuan, musyawarah untuk mufakat, dan keadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. (Nurdiansyah, 2021).

3. Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki fungsi strategis sebagai sarana untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang memahami serta mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab. Melalui pembelajaran PKn, peserta didik diarahkan untuk memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara Indonesia dengan mengembangkan karakter sebagai warga negara yang cerdas, terampil, dan berintegritas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. proses pembelajaran PKn perlu dirancang melalui pendekatan yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sehingga mampu mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik secara seimbang.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang penting bagi generasi muda dalam membentuk karakter dan sikap sebagai warga negara yang baik. Pendidikan Kewarganegaraan juga membantu peserta didik untuk berpikir lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, menghargai serta menghormati perbedaan yang ada di tengah masyarakat, dan mempersiapkan mereka agar mampu menghadapi berbagai tantangan pada era globalisasi tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. (Oktaviani & Sophianti, 2023).

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki beberapa fungsi utama, yaitu membantu peserta didik memahami cita-cita nasional dan tujuan negara, membimbing mereka dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap berbagai persoalan pribadi, sosial, maupun kenegaraan, serta menumbuhkan kemampuan untuk mengapresiasi nilai-nilai kebangsaan dan membuat keputusan secara rasional. Selain itu, PKn berfungsi sebagai wahana pembentukan warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter

melalui pembiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PKn diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkepribadian, mandiri, profesional, bertanggung jawab, produktif, serta memiliki kesehatan jasmani dan rohani sebagai bekal untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

C. Konstruksi sikap politik kritis

Konstruksi sikap politik adalah proses yang terencana untuk membentuk dan mengembangkan pandangan, keyakinan, dan nilai-nilai individu atau kelompok terhadap sistem politik dan isu-isu politik. Tujuan utamanya adalah menciptakan warga negara yang aktif, sadar akan hak dan tanggung jawabnya, serta memiliki komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

Pendidikan berperan sebagai sarana untuk membentuk warga negara yang memiliki kemampuan berpikir kritis, memahami dinamika politik, serta memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik di Indonesia. Dengan bekal tersebut, masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi secara aktif, sadar, dan bertanggung jawab dalam proses politik sehingga dapat mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi yang lebih baik. (Agata & Dhewantoro, 2025).

Sistem pemerintahan demokratis memerlukan keterlibatan warga negara untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Keterlibatan ini dapat diukur melalui partisipasi warga negara dalam penyelenggaraan pemerintah. Namun, partisipasi ini harus didukung oleh kemampuan warga negara dalam menguasai civic competence, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap dalam konteks sosial politik dan ekonomi.

Civic competence memungkinkan warga negara berperan aktif dan kritis dalam penyelenggaraan pemerintah, sehingga mempengaruhi orientasi politik mereka. Dengan demikian, konstruksi sikap politik yang efektif dapat membantu menciptakan warga negara yang lebih sadar, aktif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bernegara. (Hardian, 2021).

1. Konsep sikap

Sikap merupakan respons atau kecenderungan evaluatif yang ditunjukkan seseorang terhadap suatu objek, peristiwa, atau situasi tertentu. Sikap mencerminkan bentuk penilaian individu yang dapat bersifat positif maupun negatif sebagai hasil dari proses kognitif dan afektif terhadap stimulus yang diterimanya. Dengan demikian, sikap juga menggambarkan kesadaran individu dalam merespons lingkungan di sekitarnya.

Proses terbentuknya sikap diawali oleh adanya stimulus yang berasal dari objek atau lingkungan, kemudian diterima melalui alat indra dan diolah menjadi informasi. Informasi tersebut selanjutnya diproses dalam sistem kognitif individu sehingga menghasilkan respons berupa penilaian atau kecenderungan untuk bersikap. Penilaian yang terbentuk tidak muncul secara spontan, tetapi dipengaruhi oleh pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya, pengalaman pribadi, nilai-nilai yang dianut, serta berbagai informasi yang pernah diterima oleh individu.

2. Konsep politik

Dalam ilmu politik, terdapat beberapa konsep dasar yang penting untuk dipahami, yaitu masyarakat, negara, dan kekuasaan. Ketiga konsep tersebut saling berkaitan karena menjadi dasar dalam menjelaskan bagaimana kehidupan politik berlangsung di dalam suatu negara.

Menurut (Robert M. MacIver 2016), masyarakat adalah suatu sistem yang terbentuk dari hubungan-hubungan sosial yang tersusun secara terorganisasi. Artinya, kehidupan masyarakat tidak hanya dipahami sebagai kumpulan orang, tetapi juga sebagai jaringan interaksi yang diatur oleh norma, nilai, dan aturan yang berlaku.

Negara merupakan organisasi politik yang memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi, negara bertugas menciptakan ketertiban, melindungi kepentingan masyarakat, serta mengatur hubungan antarwarga agar kehidupan bersama dapat berjalan dengan baik. Dalam konteks ini, negara menjadi sarana bagi masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama melalui sistem pemerintahan yang berlaku.

Pada masyarakat, politik sering kali dipandang sebagai sesuatu yang identik dengan konflik, perebutan kekuasaan, atau praktik-praktik yang tidak bermoral. Anggapan tersebut membuat sebagian orang memiliki pandangan negatif terhadap politik. Namun, persepsi tersebut tidak sepenuhnya benar. Politik sebagai ilmu mempelajari bagaimana kekuasaan, pemerintahan, dan pengambilan keputusan dijalankan untuk mengatur kehidupan bersama. Sementara itu, perilaku politik yang menyimpang lebih merupakan akibat dari tindakan individu atau kelompok yang menyalahgunakan kekuasaan, bukan cerminan dari hakikat ilmu politik itu sendiri. penting untuk membedakan antara politik sebagai disiplin ilmu dan praktik politik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi maupun etika.

3. Faktor yang mempengaruhi

Sikap politik seseorang tidak muncul begitu saja, tetapi terbentuk melalui proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam kehidupannya. Lingkungan tempat seseorang tumbuh, kondisi ekonomi, serta karakter dan pengalaman pribadi memiliki peran dalam membentuk cara pandangnya terhadap politik. Selain itu, keluarga, pendidikan, media massa, lingkungan pergaulan, dan tokoh yang dijadikan panutan juga turut memengaruhi bagaimana seseorang memahami serta menyikapi berbagai persoalan politik dan kebijakan publik.

Salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah keluarga. Sebagai lingkungan pertama tempat seseorang belajar, keluarga menjadi media awal dalam menanamkan nilai-nilai, termasuk pandangan tentang kehidupan politik. Melalui interaksi sehari-hari, anak mulai mengenal cara berpikir, sikap, dan pilihan politik yang berkembang di dalam keluarganya.

Pendidikan juga memiliki peran penting dalam membentuk sikap politik. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh, semakin besar kesempatan seseorang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, bersikap rasional, dan menilai berbagai isu politik secara lebih objektif. Pengalaman belajar maupun pengalaman hidup juga memperkaya cara seseorang dalam memahami dinamika politik.

Di sisi lain, media massa dan media sosial menjadi sumber informasi yang sangat berpengaruh dalam era digital. Berita, opini, dan berbagai informasi yang disampaikan melalui media dapat membentuk cara pandang masyarakat terhadap suatu isu politik, bahkan memengaruhi sikap dan pilihan politik mereka.

Selain itu, kondisi ekonomi dan budaya juga tidak dapat diabaikan. Keadaan ekonomi sering kali menentukan kepentingan yang dianggap penting oleh seseorang, sehingga berpengaruh terhadap pilihan politiknya. Sementara itu, nilai-nilai budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk pengaruh tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun pemimpin lokal, turut membentuk cara individu memandang dan mengambil keputusan dalam kehidupan politik.

D. Civic Competence

Civic Competence adalah konsep yang dikembangkan oleh ahli ilmu sosial dan politik untuk menjelaskan kemampuan warga negara dalam berpartisipasi secara efektif dalam proses politik dan sosial. Menurut Almond dan Verba (1963), *Civic Competence* adalah kemampuan warga negara untuk memahami, menganalisis, dan berpartisipasi dalam proses politik dan sosial. *Civic Competence* terdiri dari beberapa komponen, yaitu pengetahuan politik, sikap politik, keterampilan politik, dan partisipasi politik. Pengetahuan politik adalah pengetahuan tentang sistem politik dan proses politik. Sikap politik adalah sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan politik. Keterampilan politik adalah kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Partisipasi politik adalah kegiatan yang terkait dengan politik.

Almond dan Verba (1963) mengidentifikasi tiga jenis *Civic Competence*, yaitu *Civic Competence* Partisipatif, *Civic Competence* Kognitif, dan *Civic Competence* Afektif. *Civic Competence* Partisipatif adalah kemampuan warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik. *Civic Competence* Kognitif adalah kemampuan warga negara untuk memahami informasi politik. *Civic Competence* Afektif adalah kemampuan warga negara untuk memiliki sikap positif terhadap politik. Model *Civic Competence* yang

dikembangkan oleh Almond dan Verba (1963) terdiri dari beberapa tahap, yaitu sosialisasi, partisipasi, dan kompetensi. Sosialisasi adalah proses pembelajaran nilai-nilai politik. Partisipasi adalah kegiatan politik. Kompetensi adalah kemampuan warga negara untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses politik. Dalam konteks pendidikan, *Civic Competence* dapat dikembangkan melalui pembelajaran yang berfokus pada pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan politik siswa. Pembelajaran yang efektif dapat membantu siswa menjadi warga negara yang lebih kompeten dan berpartisipasi secara efektif dalam proses politik dan sosial. "*Civic Competence* adalah kemampuan warga negara untuk memahami, menganalisis, dan berpartisipasi dalam proses politik dan sosial di masyarakat." (Almond & Verba, 1963) "*Civic Competence* terdiri dari pengetahuan politik, sikap politik, keterampilan politik, dan partisipasi politik." (Almond & Verba, 1963).

1. Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*)

Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*) merupakan landasan pemahaman tentang esensi kewarganegaraan serta teori dan konsep dasar politik. Pada jenjang sekolah dasar, muatan PPKn dirancang mencakup spektrum yang luas—mulai dari aktivitas keseharian hingga peran dalam kehidupan berbangsa—guna membentuk karakter warga negara yang ideal. Berfokus pada pemahaman hak dan kewajiban, pembelajaran ini bertujuan membina sikap serta tanggung jawab siswa sebagai warga negara, sekaligus menjadi fondasi utama bagi mereka untuk berkontribusi secara aktif dalam kehidupan bernegara. (Farizi & Prasajo, 2019.)

2. Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skills*)

Kemampuan intelektual dan partisipatoris. Keterampilan intelektual meliputi kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah sosial. Sementara keterampilan partisipatoris adalah kemampuan untuk bekerja sama, berorganisasi, dan berkomunikasi dengan sesama warga.

Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skills*) merupakan manifestasi dari pemahaman hak dan kewajiban warga negara yang diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keterampilan ini

terbagi menjadi dua dimensi utama, yaitu keterampilan intelektual dan partisipatif. Dimensi intelektual berfokus pada kemampuan berpikir kritis yang meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, serta pengemukakan pendapat terkait isu-isu publik. Sementara itu, dimensi partisipatif menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam tata kelola pemerintahan, yang menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kebebasan dan kesetaraan demokrasi. (Farizi & Prasajo, 2019).

3. Sikap Kewarganegaraan (*Civic Disposition*)

Sikap Kewarganegaraan (*Civic Disposition*) merujuk pada manifestasi sikap dan perilaku warga negara yang santun, disiplin, serta bertanggung jawab. Dimensi ini mencakup nilai-nilai moral seperti kesantunan, kepedulian sosial, toleransi, empati, dan loyalitas terhadap dasar negara. Selain itu, *Civic Disposition* juga melatih siswa untuk berpikir kritis-bijaksana, bersikap kooperatif dalam menghadapi perbedaan, serta konsisten menjaga komitmen kebangsaan. Penanaman nilai-nilai ini pada peserta didik sangat fundamental untuk mewujudkan generasi yang beretika dan berperan aktif dalam dinamika demokrasi. (Farizi & Prasajo, 2019).

E. Pembelajaran Pkn dalam membangun sikap politik kritis

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berperan strategis dalam membangun sikap politik kritis dengan menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban serta melatih kemampuan analisis. Ini membantu siswa mengevaluasi kebijakan, memahami sistem demokrasi secara rasional, dan menolak hoaks melalui pendekatan kontekstual dan reflektif.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memegang peranan krusial dalam membentuk karakter, identitas, serta partisipasi aktif warga negara. Secara komprehensif, PKn berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, prinsip demokrasi, serta pemenuhan hak dan kewajiban guna membangun budaya politik yang sehat. Keberadaannya pun memiliki dasar hukum yang kuat dalam UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003. Berakar dari perjalanan historis, dinamika sosiologis, dan konstelasi politik bangsa, PKn bertujuan mencetak generasi yang memiliki kesadaran nasional, menjunjung tinggi HAM, serta siap berkontribusi

dalam masyarakat multikultural. PKn bukan sekadar materi akademis, melainkan instrumen strategis untuk melahirkan generasi penerus yang berkarakter kuat, berwawasan global, namun tetap teguh pada identitas nasionalnya. (Waruwu1) et al., 2025).

Dengan demikian, pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sikap politik kritis peserta didik. Melalui pembelajaran yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, prinsip demokrasi, serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka juga dilatih untuk berpikir kritis, menganalisis berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, serta mampu menyikapi setiap informasi secara cermat dan bertanggung jawab.

Dengan adanya proses pembelajaran tersebut, diharapkan peserta didik dapat tumbuh menjadi pribadi yang memiliki sikap demokratis, bertanggung jawab, serta aktif berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, pembelajaran PPKn juga diharapkan mampu membentuk *civic competence* atau kompetensi kewarganegaraan yang menjadi bekal bagi peserta didik untuk menjadi warga negara yang cerdas, kritis, berkarakter, dan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

F. Penelitian terdahulu

Adapun dibawah ini penelitian yang terdahulu membahas terkait pembahasan yang berkonteks dengan kontruksi sikap politik kritis melalui pembelajaran Pkn untuk membentuk *civic competence* peserta didik.

1. Asmika Rahman, (2019), dengan judul penelitian “*Pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan untuk meningkatkan kesadaran politik siswa*”. Hasil penelitian tersebut memaparkan bahwa guru PPKn telah merancang pembelajaran dengan baik melalui penyusunan program tahunan, program semester, silabus, dan RPP yang memuat nilai-nilai pendidikan politik. Perencanaan tersebut menjadi pedoman dalam proses pembelajaran sehingga dapat membantu

meningkatkan kesadaran politik peserta didik. peneliti memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana guru merencanakan pembelajaran PPKn sebagai sarana pendidikan politik di sekolah. Peneliti hanya membahas proses pelaksanaan pendidikan politik dan belum mengkaji bagaimana sikap politik kritis peserta didik terbentuk maupun hubungannya dengan *civic competence*. Penelitian ini digunakan karena memiliki kesamaan dalam mengkaji pembelajaran PPKn sebagai media pendidikan politik. Hasil penelitian tersebut menjadi referensi untuk memahami peran pembelajaran PPKn dalam membentuk sikap peserta didik

2. Sari & Mahatmaharti, (2023) dengan judul penelitian "*Strategi guru ppkn dalam meningkatkan berpikir kritis dan kemandirian peserta didik kelas X di sma negeri 10 jombang*". Hasil penelitian tersebut memaparkan bahwa guru PPKn menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik, seperti membimbing siswa mengenali masalah, memilih informasi yang relevan, menganalisis kebenaran informasi, hingga menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis mereka sendiri. Penelitian ini menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang dilakukan guru dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik selama proses pembelajaran. Penelitian lebih berfokus pada kemampuan berpikir kritis dan kemandirian peserta didik sehingga belum membahas sikap politik kritis maupun pembentukan *civic competence*. Penelitian ini dijadikan referensi karena kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu dasar yang mendukung terbentuknya sikap politik kritis peserta didik dalam pembelajaran PPKn.
3. Endrise Septina Rawanoko, (2017) dengan judul penelitian "*Implementasi pendidikan karakter demokratis melalui pembelajaran ppkn pada siswa kelas XII*". Hasil penelitian tersebut memaparkan Penelitian ini menemukan bahwa pendidikan karakter demokratis telah diterapkan dengan baik melalui pembelajaran PPKn. Nilai-nilai demokrasi terlihat dalam perencanaan pembelajaran, proses diskusi di kelas, kegiatan ekstrakurikuler, serta interaksi peserta didik dengan guru maupun teman. Peserta didik juga menunjukkan sikap berani menyampaikan pendapat,

memberikan saran, dan menghargai pendapat orang lain. penelitian ini memberikan gambaran mengenai penerapan nilai-nilai demokrasi tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga dalam berbagai kegiatan di lingkungan sekolah. Fokus penelitian masih terbatas pada pembentukan karakter demokratis sehingga belum mengkaji pembentukan sikap politik kritis dan *civic competence* peserta didik secara khusus. Penelitian ini dipilih sebagai penelitian terdahulu karena memiliki keterkaitan dengan upaya pembentukan karakter demokratis melalui pembelajaran PPKn yang menjadi salah satu unsur penting dalam membangun sikap politik kritis peserta didik

4. Wilda Hamisa¹, (2018) dengan judul penelitian "*Peran PKN sebagai Pendidikan politik dalam membangun sikap demokratis dan partisipasi siswa dalam organisasi di SMA*". Hasil penelitian tersebut memaparkan Penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran PKn yang dilakukan secara interaktif mampu membangun sikap demokratis peserta didik. Guru menggunakan metode diskusi, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat, serta mendorong keterlibatan mereka dalam organisasi sekolah sehingga kemampuan berargumentasi dan partisipasi siswa semakin berkembang. penelitian ini menjelaskan peran guru PPKn dalam membentuk sikap demokratis peserta didik melalui pembelajaran maupun kegiatan organisasi di sekolah. penelitian ini belum membahas bagaimana sikap politik kritis peserta didik dibentuk melalui pembelajaran PPKn serta kaitannya dengan *civic competence*. Penelitian ini digunakan sebagai referensi karena menjelaskan bahwa pembelajaran PKn memiliki peran penting dalam membentuk sikap demokratis dan meningkatkan partisipasi peserta didik. Hal tersebut memiliki hubungan dengan penelitian ini yang mengkaji pembentukan sikap politik kritis melalui pembelajaran PPKn.

G. Kerangka Berpikir

Pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) kerap kali hanya dianggap sebagai disiplin ilmu teoritis yang sarat akan hafalan regulasi dan tata kelola pemerintahan. Padahal, melalui

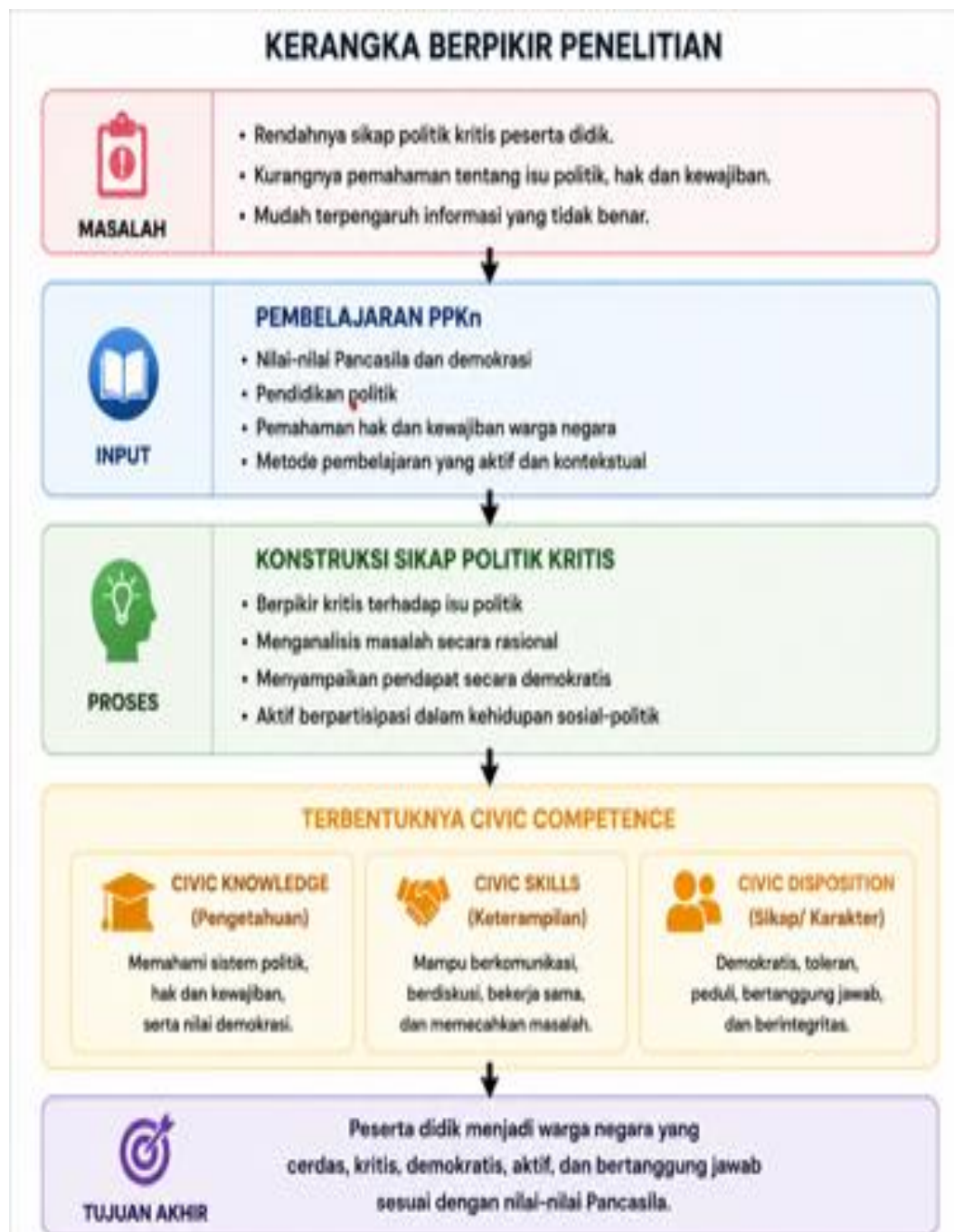
pendekatan pembelajaran yang interaktif serta berbasis *problem solving*, PKn berkedudukan sebagai fondasi awal (*input*) dalam membentuk cara pandang peserta didik. Pembelajaran PKn seyogianya tidak hanya menyajikan materi dogmatis, melainkan menanamkan pemahaman mendasar terkait hak dan kewajiban warga negara. Pemahaman ini menjadi pijakan analitis bagi siswa untuk memahami mekanisme kerja masyarakat dan negara, sekaligus bekal utama dalam merespons berbagai dinamika sosial-politik di lingkungan mereka.

Penguasaan substansi PKn tersebut selanjutnya menjadi pendorong utama tumbuh kembangnya sikap politik kritis (*proses*). Sikap kritis ini tidak dimaknai sebagai tindakan oposisional terhadap kebijakan publik, melainkan bentuk pengasahan nalar dan kepekaan sosial. Di tengah masifnya arus informasi digital, peserta didik yang memiliki daya kritis politik tidak akan mudah terpengaruh oleh isu destruktif, berita bohong, atau provokasi. Mereka terlatih untuk mengkaji, memvalidasi, dan menyaring informasi secara rasional demi kemaslahatan publik. Selain itu, iklim kritis ini menumbuhkan keberanian siswa dalam menyampaikan gagasan serta aspirasi secara santun, beretika, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada puncaknya, sinergi antara pemahaman konseptual PKn dan ketajaman berpikir kritis bermuara pada manifestasi *Civic Competence* atau Kompetensi Kewarganegaraan (*output*). Muara ini menandai lahirnya profil warga negara yang ideal (*smart and good citizen*). Siswa tidak hanya unggul pada aspek kognitif (*Civic Knowledge*) mengenai sistem hukum dan demokrasi, tetapi juga memiliki kecakapan partisipatif (*Civic Skills*) dalam berorganisasi dan menyelesaikan konflik secara kooperatif. Seluruh dimensi ini dibingkai oleh karakter kewarganegaraan (*Civic Disposition*) yang kokoh, mencakup nilai toleransi, empati sosial, dan komitmen kebangsaan.

Secara komprehensif, alur kerangka berpikir ini membentuk hubungan kausalitas yang linier dan berkesinambungan. Kualitas pembelajaran PKn yang baik akan memicu lahirnya pemikiran politik yang kritis. Nalar kritis yang terasah tersebut pada akhirnya mengkristal menjadi kompetensi kewarganegaraan yang utuh, sehingga mampu mentransformasi peserta didik

dari pembelajar pasif menjadi generasi penerus yang berkarakter, responsif, serta berkontribusi nyata bagi bangsa.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026